

## **Dampak Pemekaran Daerah terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan**

### *The Impact of Regional Expansion on Economic Structure of The Hulu Sungai Utara District and Balangan District*

**Ernawati Lipat Masan\*, M.Rusmin Nuryadin**

Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

[lipatmasanernawati@gmail.com](mailto:lipatmasanernawati@gmail.com)

#### **Abstract**

*Generally, regional expansion is one form of local autonomy and is one of the policies that need to be considered due to regional growth, equitable regional development, and regional development. It can be maximized. The purpose of this study was to determine the impact of the Balangan Regency region expansion from the Hulu Sungai Utara Regency, whether with the division there was a shift in economic structure in the two districts. Several analysis methods are used to answer the problem, namely: Location Quotient Analysis (LQ), Shift-Share Analysis, and Overlay Analysis. The data used in this study are secondary in the form of Hulu Sungai Utara Regency GRDP, Balangan Regency GRDP, and South Kalimantan Province GRDP based on business fields with the base year 2010. The study results based on Location Quotient analysis show that the superior base sector in North Hulu Sungai Regency is parent districts are as many as 12 base sectors.*

*In contrast, in the newly formed districts, there is only one base sector. The calculation result of Shift-Share analysis shows a shift in the two districts' economic structure, namely from the primary industry to the secondary sector. The development of Overlay analysis indicates that there are ten leading sectors in the central districts, and in the newly created communities, there are no top sectors.*

**Keywords:** *Economic Structure, Location Quotient, Shift-Share, Overlay*

#### **Abstrak**

Umumnya, salah satu contoh bentuk dari otonomi daerah adalah pemekaran daerah atau wilayah yang mana merupakan kebijakan yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran daerah atau wilayah dapat menciptakan pemerataan pembangunan daerah atau wilayah serta adanya pengembangan daerah dapat dimaksimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari adanya pemekaran wilayah Kabupaten Balangan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, apakah dengan adanya pemekaran ini terjadi pergeseran struktur ekonomi pada kedua kabupaten tersebut. Digunakan beberapa metode analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu : *Analisis Location Quotient (LQ)*, *Analisis Shift-Share*, dan *Analisis Overlay*. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder berupa nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara, PDRB Kabupaten Balangan dan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan analisis *Location Quotient (LQ)*, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Kabupaten induk memiliki dua belas (12) sektor basis Unggulan sedangkan pada kabupaten hasil pemekaran yaitu Kabupaten Balangan hanya terdapat satu (1) sektor basis. Hasil perhitungan analisis *Shift-Share* menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi pada kedua kabupaten tersebut yaitu dari sektor primer ke sektor sekunder.

Selain itu hasil perhitungan analisis *Overlay* diketahui bahwa di kabupaten induk terdapat sepuluh (10) sekktor unggulan dan pada kabupaten hasil pemekaran tidak memiliki satupun sektor unggulan.

**Kata Kunci :** *Struktur Ekonomi, Location Quotient, Shift-Share, Overlay*

## PENDAHULUAN

Pemekaran daerah adalah suatu strategi yang akan dilakukan ketika wilayah pelayanan telah menjadi luas. Hal inilah yang sering menjadi alasan pemerintah sulit mencapai tingkat maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya termasuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara baik dan merata. Dalam kebijakan pembentukan daerah, daerah induk diharapkan mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga menjadi pemicu bagi daerah baru yang dibentuk juga mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Hal inilah yang akan menjadi pemicu terwujud atau tidaknya tujuan pemekaran daerah tersebut.

Pemekaran daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat baru dalam pembangunan agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan memberikan kesempatan baru dalam usaha pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat setelah terlaksananya pemekaran tersebut. Dengan kata lain, pemekaran daerah berarti pembentukan Kabupaten/Kota yang baru, oleh karena itu melalui pemekaran daerah tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu terwujudnya titik-titik yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut maka pendapatan masyarakat akan turut meningkat sehingga terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat, jalur birokrasi yang semakin dekat serta rentang kendali yang semakin pendek.

Oleh sebab itu, sebelum adanya pengusulan terkait pemekaran daerah dari suatu wilayah terlebih dahulu disiapkan kajian yang akan mendukung pemekaran daerah tersebut. Dalam hal ini yang bertugas melaksanakan kajian tersebut adalah kepala daerah yang bersangkutan. Kajian tersebut akan menguraikan layak atau tidak apabila sebuah otonom baru terbentuk serta akan memberikan penilaian faktor-faktor teknis secara kuantitatif. Faktor-faktor yang termasuk dalam penilaian kuantitatif ini adalah kependudukan dan potensi daerah, serta kemampuan secara ekonomi dan keuangan

selama sepuluh tahun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk. Selain menilai secara kuantitatif ada juga penilai secara kualitatif terhadap faktor lain yaitu Sumber Daya Alam yang belum diolah, potensi konflik, kondisi etnik dan historis. Kabupaten Hulu Sungai memiliki berbagai macam sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara pada gambar dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Perbandingan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No.	Lapangan Usaha	2002	2003	2017	2018
1	Pertanian	2,62	1,53	17,14	17,3
2	Pertambangan	6,09	3,01	0,23	0,22
3	Industri Pengolahan	-1,89	0,63	10,46	9,98
4	Listrik dan Air Minum	15	7,85	0,84	0,87
5	Bangunan	12	8,59	10,43	10,31
6	Perdagangan, Restoran dan Pengolahan	1,79	3,13	14,29	14,68
7	Pengangkutan dan Komunikasi Bank dan Lembaga Keuangan	5,23	4,29	11,05	11,11
8	Lainnya	4,27	9,81	3,17	3,21
9	Jasa-jasa	2,87	2,15	2,19	2,17
	<b>Total</b>	<b>47,98</b>	<b>40,99</b>	<b>69,8</b>	<b>69,85</b>

*Sumber : BPS Hulu Sungai Utara, 2010*

Dari tabel 1.1 diatas sebelum pemekaran terlihat bahwa sektor pertanian jika dibandingkan dengan sektor pertambangan, kontribusi paling besar adalah sektor pertambangan. Berbeda dengan setelah pemekaran keadaannya berbalik, yaitu kontribusi sektor pertanian lebih dominan dibandingkan dengan sektor pertambangan. Hal ini disebabkan sektor tambang yang awalnya termasuk dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di Balangan namun ketika pemekaran, Balangan terpisah menjadi Kabupaten sendiri sehingga Kabupaten Hulu Sungai Utara kehilangan stok sumber daya alam khususnya di pertambangan. Selain itu, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Kalimantan Selatan, kontribusi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara lah yang lebih kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Balangan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri, masih lebih besar kontribusi dari Kabupaten Balangan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Rata-rata presentase kontribusi terhadap jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-
-----	----------------	------	------	------	------	------	-------

							<b>rata</b>
1	Tanah Laut	7,98	7,88	7,8	7,76	7,71	7,826
2	Kotabaru	13,29	13,31	13,34	13,38	13,39	13,342
3	Banjarnegara	8,96	9,11	9,13	9,1	9,12	9,084
4	Barito Kuala	4,31	4,56	4,68	4,68	4,69	4,584
5	Tapin	4,8	4,72	4,72	4,67	4,66	4,714
6	Hulu Sungai Selatan	3,33	3,49	3,56	3,55	3,59	3,504
7	Hulu Sungai Tengah	3,55	3,75	3,87	3,85	3,84	3,772
8	Hulu Sungai Utara	2,46	2,6	2,65	2,64	2,66	2,602
9	Tabalong	11,53	10,83	10,46	10,32	10,15	10,658
10	Tanah Bumbu	12,09	11,69	11,33	11,21	11,08	11,48
11	Balangan	7,31	6,75	6,45	6,32	6,25	6,616
12	Banjarmasin	15,97	16,8	17,31	17,49	17,67	17,048
13	Banjarbaru	4,41	4,74	4,98	4,98	5,08	4,838

*Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2019*

Dari data pada tabel diatas terlihat jelas bahwa kontribusi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai kabupaten induk adalah yang paling kecil diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Balangan yang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, kontribusi Kabupaten Balangan lebih besar bahkan diatas 5, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya 2,57 %. Dari uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dampak dari adanya pemekaran daerah tersebut terhadap struktur ekonomi antara kabupaten induk (Kabupaten Hulu Sungai Utara) dengan kabupaten hasil pemekaran (Kabupaten Balangan).

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : (1) bagaimana perubahan sektor unggulan antara kedua kabupaten setelah pemekaran? (2) apakah ada pergeseran struktur ekonomi antara kedua kabupaten ketika pemekaran itu terjadi? (3) Bagaimana kontribusi sektor unggulan terhadap daya saing perekonomian kedua kabupaten tersebut?

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukan penelitian antara lain : (1) Untuk mengetahui perubahan sektor unggulan antara kedua kabupaten setelah pemekaran. (2) Untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi kedua kabupaten. (3)

Untuk mengetahui kontribusi sektor unggulan terhadap daya saing perekonomian kedua kabupaten.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Pembangunan Ekonomi**

Menurut Sukirno (Sukirno, 2011) pembangunan ekonomi adalah sebuah proses jangka panjang yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan riil masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua (2) aspek yang saling terkait yaitu pendapatan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan nasional kemudian akan dibagi dengan jumlah penduduk untuk memperoleh pendapatan perkapita.

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Peningkatan GDP (*Gross Domestik Product*) dengan tidak melihat pertumbuhan penduduk, artinya peningkatan pendapatan melebihi peningkatan jumlah penduduk atau dibawah peningkatan jumlah penduduk disebut Pertumbuhan Ekonomi menurut Suryana (Suryana, 2000). Apabila terus terjadi peningkatan jumlah produksi barang maupun jasa dalam sebuah negara, maka negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi.

### **Konsep PDRB**

Dalam suatu wilayah regional, setiap sektor lapangan usaha menjalankan usahanya tanpa memandang faktor usaha apapun yang digunakan serta memberikan nilai tambah maka akan disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (Arsyad M. A., 1992). Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDRB yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran.

### **Teori Pemekaran**

J Kaloh (Kaloh, 2007) mengatakan bahwa dalam pemahaman secara umum pemekaran daerah berarti pembentukan daerah otonom baru. Daerah otonom baru tersebut pada akhirnya memiliki kebebasan dalam mengembangkan daerahnya tersebut, lebih mandiri dalam mengolah sumber daya alam daerahnya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut, sehingga tercapailah tujuan dari pemekaran itu sendiri yaitu kesejahteraan masyarakat setempat.

### **Perubahan Struktur Ekonomi**

Perubahan struktur ekonomi juga disebut sebagai transformasi struktur ekonomi. Dengan adanya transformasi struktur ekonomi maka akan berdampak terhadap

pembangunan ekonomi yang menjadi lebih baik. Dalam transformasi struktur ekonomi seluruh perubahan komponen yang terjadi dalam perekonomian saling memiliki keterkaitan, yaitu komponen agregat demand (AD), ekspor-impor (X-M), agregat supply (AS), selain itu ada beberapa faktor -faktor produksi yang digunakan juga yaitu Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini sebagai tenaga kerja serta modal (Tambunan, 2003).

### **Teori Basis Ekonomi**

Teori yang berusaha menemukan dan meramalkan aktivitas sektor basis yang berarti aktivitas mengekspor ke luar daerah dalam suatu wilayah dan setelah itu menganalisis dampak yang akan diperoleh dari adanya aktivitas ekspor tersebut disebut Teori Basis Ekonomi. Apabila suatu wilayah mampu mengekspor hasil dari sektor-sektor ke luar daerah maka daerah tersebut sudah mengalami pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya Glasson (Glasson, 1999) membagi perekonomian menjadi dua (2) sektor, yaitu: sektor basis serta sektor non basis.

### **Sektor Unggulan**

Sektor unggulan berarti sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor unggulan dapat mendorong sektor-sektor lain sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Sektor-sektor yang dapat di dorong oleh sektor unggulan adalah sektor yang mensupply input maupun memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksi (Widodo, 2006).

### **Pergeseran Struktur Ekonomi dan Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Dalam mengukur pergeseran struktur perekonomian suatu daerah sering digunakan teknik analisis *Shift-Share* karena teknik ini perubahan struktur ekonomi suatu kabupaten akan dibandingkan dengan perekonomian secara regional (provinsi). Pergeseran struktur ekonomi akan terlihat ketika dibandingkan dengan daerah lain. Dalam analisis *shift-share* akan menghasilkan data berupa kinerja perekonomian yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yaitu Analisis *Shift-Share* ini memberikan data terkait kinerja perekonomian yang saling berhubungan.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu oleh Ricca Hermawati (2007) dengan judul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Selatan”

menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan periode sebelum pemekaran (1993-1996) sangat fluktuatif sedangkan pada periode setelah pemekaran wilayah (2002-2005) laju pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Namun rata-rata laju pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan mengalami penurunan pada periode setelah pemekaran. Rata-rata laju pertumbuhan PDRB sebelum pemekaran wilayah adalah 7,26% menjadi 4,83% setelah pemekaran wilayah dari tahun 2002-2005.

Penelitian dari Elisabeth Ivakdalam (2011) yang berjudul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke” dengan hasil penelitian bahwa sektor ekonomi yang termasuk sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Merauke sebelum pemekaran adalah adalah sektor pertanian dan sektor listrik, gas, dan air bersih, sedangkan sektor basis ekonomi unggulan setelah pemekaran adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan komunikasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke tahun 2001- 2003 sebesar 7,28 persen, sedangkan tahun 2004-2006 atau setelah pemekaran menjadi 8,58 persen kecuali pada tahun 2007 mengalami penurunan akibat perpindahan pelabuhan ekspor perikanan ke daerah lain.

Penelitian oleh Mochammad Iskandar dan Bernardin Ridwan (2012) yang berjudul “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Perkembangan Perekonomian Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagai Kabupaten Induk” menunjukkan bahwa dampak dari pemekaran daerah berpengaruh secara positif dalam struktur dan perkembangan perekonomian yang dapat dilihat melalui peningkatan pertumbuhan nilai PDRB setelah terjadi pemekaran dengan nilai rata-rata peningkatan sebesar 5,44% dari 1,54% sebelum pemekaran terjadi. Selain dengan adanya pemekaran nilai PDRB perkapita secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,507 Juta dari Rp. 987,4 Ribu serta adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah yang dilihat melalui adanya peningkatan terhadap pendapatan daerah dari tahun ke tahun sebesar 1,05% dari rata-rata sebesar 0,67% sebelum terjadi pemekaran.

Penelitian oleh Siti Zainab (2018) dengan judul “Analisis Sektor-sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah” yang menunjukkan bahwa Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) pada seluruh sektor perekonomian dengan pendapatan daerah sebagai indikator perhitungan yaitu PDRB atas harga konstan dengan tahun dasar 2010 menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2013

sektor basis unggulan yang dapat diprioritaskan sebanyak tiga belas (13) sektor. Ketiga belas sektor tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan serta pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu hasil perhitungan analisis *Shift-Share* menunjukkan bahwa sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tingkat pertumbuhannya lebih cepat apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 sektor. Keempat belas sektor tersebut memiliki komponen *Proportional shift* (M) positif ( $M > 0$ ). Sedangkan hasil perhitungan pergeseran bersih melalui *shift-share* sektor yang termasuk dalam sektor progresif sebanyak 16 sektor.

## **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan jenis penelitian yang deskriptif dan kuantitatif yaitu dengan memberikan gambaran kemudian menganalisis data-data hasil observasi yang akan disajikan secara sistematis dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan perhitungan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus – rumus yang telah ditetapkan pada penelitian ini (Bungin, 2008). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari keterangan pihak – pihak yang berkompeten terkait yaitu BPS Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, BPS Kabupaten Balangan, Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan.

## **Definisi dan Variabel Operasional**

### ***Pemekaran Wilayah***

Pemekaran wilayah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan agar terjadi percepatan pembangunan ekonomi daerah.

### ***Sektor-sektor Ekonomi***

Sektor-sektor ekonomi merupakan sektor pembentuk PDRB yang berperan dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Cara perhitungan PDB dan akan menghitung Produk Domestik Bruto berdasar tahun dasar 2010, memiliki tujuh belas (17) indikator, yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah

dan Daur Ulang; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya (BPS, 2016).

### ***Struktur Ekonomi***

Struktur Ekonomi adalah ukuran peran setiap sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. pada umumnya diketahui bahwa pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan aektor ekonomi akan semakin cepat apabila di dukung oleh faktor-faktor penentu lain seperti Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini sebagai tenaga kerja, bahan baku, modal serta teknologi yang tersedia.

### ***Perubahan Sektor Unggulan Ekonomi***

Dalam hal ini untuk mengetahui perubahan dari sektor unggulan ekonomi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan maka digunakan alat analisis Location Quotient yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian mengarah pada identifikasi spesialisasi / basis kegiatan perekonomian.

### ***Sektor Unggulan***

Sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Location Quotient* dan analisis *Shift-share* yang akan digabungkan dalam analisis *Overlay*. Ketiga alat analisis ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui deskripsi kegiatan perekonomian dari suatu kabupaten/kota

### ***Pergeseran Struktur***

Dari adanya perubahan pada sektor unggulan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan maka dipastikan akan ada pergeseran pada struktur perekonomian. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis Shift Share untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian pada suatu kabupaten / kota tertentu.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua antara lain: teknik studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari mempelajari buku-buku, jurnal dan artikel yang dijadikan bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu teknik dokumentasi yaitu dengan mencatat data dan sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya seperti BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara, BPS Kabupaten Balangan, BAPPEDA dan Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alat analisis yaitu Analisis *Location Quotient* (LQ) untuk melihat sektor basis, Analisis *Shift-Share* untuk melihat pergeseran struktur ekonomi dan Analisis *Overlay* untuk melihat sektor unggulan dan daya saing ekonomi.

### HASIL DAN ANALISIS

#### Analisis *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Hulu Sungai Utara Sebelum Pemekaran (2000-2002) dan Setelah Pemekaran (2014-2018)

Untuk mengetahui keunggulan komparatif dalam perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan digunakan Analisis *Location Quotient* (LQ) dengan membandingkannya pada tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat diketahui sektor-sektor yang tergolong sektor basis serta sektor non basis sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Nilai *Location Quotient* Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Keterangan	Rata-rata	Kategori	Keterangan	Rata-rata	Kategori
1	Pertanian	0,98	NON BASIS	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,23	BASIS
2	Pertambangan dan Penggalian	2,44	BASIS	Pertambangan dan Penggalian	0,009	NON BASIS
3	Industri Pengolahan	0,26	NON BASIS	Industri Pengolahan	0,80	NON BASIS
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,36	NON BASIS	Pengadaan Listrik dan Gas	0,88	NON BASIS
5	Bangunan	0,6	NON BASIS	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	1,99	BASIS

6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,76	NON BASIS	Limbah dan Daur Ulang Konstruksi	1,42	BASIS
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,43	NON BASIS	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,60	BASIS
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perumahan	0,72	NON BASIS	Transportasi dan Pergudangan	1,31	BASIS
9	Jasa-jasa	1,14	BASIS	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	BASIS
10				Informasi dan Komunikasi	1,15	BASIS
11				Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	NON BASIS
12				Real Estat	1,67	BASIS
13				JasaPerusahaan	0,64	NON BASIS
14				Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,26	BASIS
15				Jasa Pendidikan	2,20	BASIS
16				Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	BASIS
17				Jasa Lainnya	1,98	BASIS

*Sumber : Lampiran 9 dan 10, Hasil Perhitungan LQ HSU Sebelum dan setelah Pemekaran*

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil perhitungan LQ sektor yang termasuk dalam kategori basis di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum pemekaran sebanyak dua sektor dan setelah pemekaran sebanyak empat belas sektor. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor di Kabupaten Hulu Sungai tara sebagai kabupaten induk lebih dominan dalam kategori basis yang mana dapat memenuhi kebutuhan daerahnya bahkan mampu mengekspor ke daerah lain.

#### **Analisis Location Quotient Kabupaten Balangan**

Untuk mengetahui keunggulan komparatif dalam perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan digunakan Analisis *Location Quotient* (LQ) dengan membandingkannya pada tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil

analisis tersebut, maka dapat diketahui sektor-sektor yang tergolong sektor basis serta sektor non basis sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Hasil Analisis *Location Quotient* Kabupaten Balangan Tahun 2014-2018**

No.	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata	Kategori
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,71	0,73	0,75	0,74	0,76	0,74	NON BASIS
2	Pertambangan dan Penggalian	2,48	2,55	2,62	2,64	2,65	2,59	BASIS
3	Industri Pengolahan	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	NON BASIS
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22	0,21	NON BASIS
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,49	0,49	0,50	0,50	0,52	0,50	NON BASIS
6	Konstruksi	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49	0,48	NON BASIS
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,47	0,47	0,47	0,49	0,48	0,47	NON BASIS
8	Transportasi dan Pergudangan	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,25	NON BASIS
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	NON BASIS
10	Informasi dan Komunikasi	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,33	NON BASIS
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	NON BASIS
12	Real Estat	0,35	0,35	0,36	0,38	0,39	0,36	NON BASIS
13	JasaPerusahaan	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	NON BASIS
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,61	0,62	0,63	0,65	0,66	0,64	NON BASIS
15	Jasa Pendidikan	0,57	0,58	0,60	0,62	0,61	0,60	NON BASIS
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,37	0,3	0,38	0,39	0,40	0,38	NON BASIS

1	Jasa Lainnya	0,36	0,36	0,37	0,38	0,38	0,37	NON
7								BASIS

Sumber : Lampiran 11, Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Balangan

Dari tabel diatas, berdasarkan hasil perhitungan LQ sektor yang termasuk dalam kategori basis di Kabupaten Balangan hanya satu sektor. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor di Kabupaten Balangan sebagai kabupaten hasil pemekaran lebih dominan dalam kategori non basis yang mana belum mampu dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga tidak dapat mengekspor ke daerah lain.

### **Hasil Analisis *Shift-Share* Kabupaten Hulu Sungai Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran**

Hasil analisis *Shift-share* Kabupaten Hulu Sungai Utara sebelum pemekaran selama tahun 2000-2002 menunjukkan nilai perubahan sektoral PDRB, dimana pada tahun 2000 sebesar Rp. 46.757.136 menjadi Rp. 6.697.398 pada tahun 2002. Hal tersebut dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu pertumbuhan regional (Rij), bauran industri (Mij) dan keunggulan kompetitif (Cij). Ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara juga ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Komponen *regional share* yang memberikan kontribusi paling besar yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian senilai Rp. 19.613.361.

Komponen pergeseran proporsional -Mij mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara. Besaran sumbangan komponen pergeseran proposional ini sebesar Rp. 20.144.172,17, yang mana ada beberapa sektor yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian senilai Rp. 15.015.708,5. Total pergeseran differensial -Cij yang dimiliki seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. 72.589,89. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara relatif cepat dengan pertumbuhan sektor sejenis dalam Provinsi Kalimantan Selatan karena hasilnya yang bernilai positif. Sektor-sektor yang memiliki nilai positif adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor transportasi dan pergudangan dan sektor industri pengolahan.

**Tabel 5**

### **Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000-20002**

No	Sektor	Nij	Mij	Cij	Dij
				-	
1	Pertanian	10.158.51	1 3.055.215,54	3.393.239,8	4 9.820.487
	Pertambangan dan	19.613.36		9.327.586,0	43.956.65
2	Penggalian	1	15.015.708,5	8	6
					-
3	Industri Pengolahan	2.217.682	-4.929.709,1	530.455,75	2.181.571
	Listrik, Gas, dan Air			-	
4	Bersih	240.748,2	659.546,44	181.775,59	718.519
5	Bangunan	1.206.481	446.970,32	734.230,05	2.387.681
				-	
	Perdagangan, Hotel dan			4.954.023,1	
6	Restoran	5.409.164	2.981.090,18	9	3.436.231
				-	
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.212.327	528.230,04	893.011,35	1.847.546
				-	
	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perumahan			1.697.102,0	
8		1.092.554	1.203.631,85	1	599.084
9	Jasa-jasa	4.606.308	1.183.488,41	599.468,99	6.389.265
		<b>46.757.13</b>	<b>20.144.172,1</b>		
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>72.589,89</b>	<b>6.697.398</b>

Sumber: Lampiran 12, Hasil Perhitungan Shift Share Kabupaten HSU

Hasil analisis *shift share* Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2014-2018 menunjukkan nilai perubahan sektoral PDRB meningkat. Komponen regional share yang memberikan kontribusi paling besar yaitu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan senilai Rp. 96.478,90 milyar dan pengadaan listrik dan gas merupakan sektor dengan kontribusi terendah. Komponen pergeseran proporsional -Mij mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara. Besaran sumbangan komponen pergeseran proposional ini sebesar Rp. 126.493,20 juta, yang mana ada sektor yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor senilai Rp. 46.945,46 milyar. Sektor-sektor yang menerima pengaruh pergeseran proporsional negatif yang tergolong sektor kurang maju pada tingkat kawasan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor pertambangan dan penggalian.

Total pergeseran differensial -Cij yang dimiliki seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp. (40.537,30) milyar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Utara relatif lambat dengan pertumbuhan sektor sejenis dalam Provinsi Kalimantan Selatan karena hasilnya yang bernilai negatif. Sedangkan sektor-sektor yang memiliki pergeseran differensial yang bernilai positif yang mana perkembangan pertumbuhannya lebih cepat dengan sektor sejenis dalam Provinsi Kalimantan Selatan karena hasilnya yang bernilai positif sebanyak 7 sektor.

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 - 2018**

No.	Sektor	Rij (Regional Share)	Mij (Propositional Shift)	Cij (Differential Shift)	Dij (Pertumbuhan Ekonomi)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	96.478,90	(24.017,28)	(22.220,02)	50.241,60
2	Pertambangan dan Penggalian	1.295,34	(767,87)	208,03	735,5
3	Industri Pengolahan	53.363,56	6.174,03	(8.334,09)	51.203,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	444,12	677,32	(194,73)	926,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	3.776,72	2.091,38	308,4	6.176,50
6	Konstruksi	53.198,27	14.330,22	(2.159,88)	65.368,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	66.593,03	46.945,46	5.697,40	119.235,90
8	Transportasi dan Pergudangan	39.022,90	21.650,45	(14.877,85)	45.795,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.876,31	6.275,58	(170,29)	18.981,60
10	Informasi dan Komunikasi	19.644,01	15.793,36	375,53	35.812,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15.012,31	3.571,78	4.216,81	22.800,90
12	Real Estate	18.893,17	4.116,44	(2.905,71)	20.103,90
13	JasaPerusahaan	1.823,70	1.207,67	(567,07)	2.464,30
14	Administrasi				

	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	61.006,7 3	(6.197,22)	782,69	55.592,20
15	Jasa Pendidikan	45.464,0 8	22.864,00	3.817,62	72.145,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.486,2 8	5.690,97	268,45	16.445,70
17	Jasa Lainnya	10.846,2 7	6.086,91	(4.782,59)	12.150,60
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>510.225,70</b>	<b>126.493,20</b>	<b>(40.537,30)</b>	<b>596.181,60</b>

Sumber : Lampiran 13, Hasil Analisis Shift-Share Kab.HSU

### Analisis Shift-Share Kabupaten Balangan

Hasil analisis shift share Kabupaten Balangan selama tahun 2014-2018 menunjukkan nilai perubahan sektoral PDRB meningkat. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga ditentukan oleh peningkatan PDRB Kabupaten Balangan. Komponen regional share yang memberikan kontribusi paling besar yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian senilai Rp. 1.155.158,76 milyar. Sementara sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor dengan kontribusi terendah. Komponen pergeseran proporsional -Mij mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB Kabupaten Balangan. Besaran sumbangan komponen pergeseran proposional ini bernilai negatif yaitu Rp. -608.931,43 juta, meskipun begitu ada banyak sektor yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor senilai Rp. 43.249,80 milyar. Sektor ini merupakan sektor yang perkembangan pertumbuhannya relatif cepat dibandingkan dengan sektor lainnya. Jika perekonomian Kabupaten Balangan terkonsentrasi pada sektor ini maka akan memberikan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor-sektor yang menerima pengaruh pergeseran proporsional negatif yang tergolong sektor kurang maju pada tingkat kawasan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Total pergeseran differensial -Cij yang dimiliki seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Balangan sebesar Rp. -608.931,43 milyar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Balangan relatif lambat dengan pertumbuhan sektor sejenis dalam Provinsi Kalimantan Selatan karena hasilnya yang bernilai negatif. Semua sektor pada pergeseran differensial memiliki nilai negatif. Hal ini yang membuat perkembangan pertumbuhan lebih lambat dengan sektor sejenis dalam Provinsi Kalimantan Selatan karena hasilnya yang bernilai negatif.

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Shift-Share Kabupaten Balangan Tahun 2014 - 2018**

No	Sektor	Nij (National Share)	Mij (Proposio nal Shift)	Cij (Different ial Shift)	Dij (Pertumbu han Ekonomi)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	169.140,56	-42.105,53	-47.267,73	79.767,30
2	Pertambangan dan Penggalian	1.155.158,76	-	-	134.229,40
3	Industri Pengolahan	23.424,97	2.710,21	-13.197,08	12.938,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	331,59	505,7	-390,09	447,2
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	2.939,92	1.628,00	-2834,32	1.733,60
6	Konstruksi	54.272,17	14.619,50	-36.495,47	32.396,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	61.350,66	43.249,80	-61.441,26	43.159,20
8	Transportasi dan Pergudangan	22.816,72	12.659,03	-21.059,75	14.416,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.949,29	1.924,78	-3216,37	2.657,70
10	Informasi dan Komunikasi	17.950,45	14.431,78	-21518,03	10.864,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.469,14	825,39	-1.328,03	2.966,50
12	Real Estat	12.233,35	2.665,40	-7.729,45	7.169,30
13	JasaPerusahaan	744,35	492,91	-639,46	597,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	52.259,96	-5.308,70	-18.713,06	28.238,20
15	Jasa Pendidikan	37.227,14	18.721,62	-23.345,07	32.603,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.027,37	5.441,91	-8.020,58	7.448,70
17	Jasa Lainnya	6.017,28	3.376,89	-5.243,77	4.150,40
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>1.633.313,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>415.783,504</b>

Sumber : Lampiran 14, Hasil Analisis Shift-Share Kab. Balangan

**Analisis Overlay Kabupaten Hulu Sungai Utara Sebelum dan Setelah Pemekaran**

**Tabel 8**  
**Hasil Deskripsi Analisis *Overlay* di Kabupaten Hulu Sungai Utara**  
**Sebelum dan Setelah Pemekaran**

No.	Sektor	Setelah Pemekaran			Sebelum Pemekaran			
		Nominal LQ	Nominal Shift Share	Kategori Sektor	Sektor	Nominal LQ	Minimal Shift Share	Kategori Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	LQ > 1	PS < 0	Potensial	Pertanian	LQ < 1	PS > 0	Berkembang
2	Pertambangan dan Penggalian	LQ < 1	PS < 0	Terbelakang	Pertambangan dan Penggalian	LQ > 1	PS > 0	Unggulan
3	Industri Pengolahan	LQ < 1	PS > 0	Berkembang	Industri Pengolahan	LQ < 1	PS < 0	Terbelakang
4	Pengadaan Listrik dan Gas	LQ < 1	PS > 0	Berkembang	Listrik, Gas dan Air Bersih	LQ < 1	PS > 0	Berkembang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	LQ > 1	PS > 0	Unggulan	Bangunan	LQ < 1	PS > 0	Berkembang
6	Konstruksi	LQ > 1	PS > 0	Unggulan	Perdagangan, Hotel dan Restoran	LQ < 1	PS > 0	Berkembang
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	LQ > 1	PS > 0	Unggulan	Pengangkutan dan Komunikasi	LQ < 1	PS > 0	Berkembang
8	Transportasi dan Pergudangan	LQ > 1	PS > 0	Unggulan	Keuangan, Perumahan dan Jasa Persewaan	LQ < 1	PS > 0	Berkembang

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	LQ > 1	PS > 0	Unggulan	Jasa-jasa	LQ > 1	PS > 0	Unggulan
10	Informasi dan Komunikasi	LQ > 1	PS > 0	Unggulan				
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	LQ < 1	PS > 0	Berkembang				
12	Real Estat	LQ > 1	PS > 0	Unggulan				
13	Jasa Perusahaan	LQ < 1	PS > 0	Berkembang				
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	LQ > 1	PS < 0	Potensial				
15	Jasa Pendidikan	LQ > 1	PS > 0	Unggulan				
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	LQ > 1	PS > 0	Unggulan				
17	Jasa Lainnya	LQ > 1	PS > 0	Unggulan				

Sumber : Lampiran 18 dan 19, Hasil Analisis Overlay Kab.HSU

Dari tabel diatas mengenai hasil perhitungan nilai *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014-2018 dapat dilihat perkembangan perekonomian yang menjadi prioritas dan sektor mana saja yang dapat dikembangkan.

### Analisis Overlay Kabupaten Balangan

**Tabel 9**  
**Hasil Deskripsi Analisis Overlay di Kabupaten Balangan Tahun 2014-2018**

No	Sektor	LQ	Nomina 1	Shift Share	Nomina 1
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,74	LQ < 1	- 42.105,53	PS < 0
2	Pertambangan dan Penggalian	2,59	LQ > 1	- 684770,1	PS < 0
3	Industri Pengolahan	0,12	LQ < 1	2710,2083	PS > 0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	LQ < 1	505,7	PS > 0
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,56	LQ < 1	1627,9956	PS > 0
6	Konstruksi	0,4	LQ < 1	14619,50	PS > 0

		8		2	
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,4	LQ < 1	43249,79	PS > 0
		7		6	
8	Transportasi dan Pergudangan	0,2	LQ < 1	12659,03	PS > 0
		5		2	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,1	LQ < 1	1924,781	PS > 0
		4		7	
10	Informasi dan Komunikasi	0,3	LQ < 1	14431,77	PS > 0
		3		9	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,0	LQ < 1	825,3913	PS > 0
		7		6	
12	Real Estat	0,3	LQ < 1	2665,400	PS > 0
		6		3	
13	JasaPerusahaan	0,0	LQ < 1	492,9118	PS > 0
		9		7	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,6	LQ < 1	-	PS < 0
		4		5308,704	
15	Jasa Pendidikan	0,6	LQ < 1	18721,62	PS > 0
				3	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,3	LQ < 1	5441,913	PS > 0
		8		2	
17	Jasa Lainnya	0,3	LQ < 1	3376,889	PS > 0
		7		3	

Sumber : Lampiran 20, Hasil Perhitungan Overlay Kab. Balangan

Dari tabel diatas mengenai hasil perhitungan nilai *Location Quotient* (LQ) dan *shift share* Kabupaten Balangan Tahun 2014-2018 dapat dilihat perkembangan perekonomian yang menjadi prioritas dan sektor mana saja yang dapat dikembangkan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sektor yang dapat menjadi sektor unggulan, sektor berkembang, sektor potensial dan sektor terbelakang.

### Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya pemekaran wilayah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara dan menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Balangan berdampak pada struktur ekonomi kedua kabupaten baik kabupaten induk maupun kabupaten hasil pemekaran yaitu dari sektor primer ke sektor sekunder. Selain itu, adanya pemekaran daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan ini secara agregat lebih menguntungkan Kabupaten Balangan baik dalam hal Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan nilai Produk Domestik Regional Bruto.

### Kelemahan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus pada struktur ekonomi setelah adanya pemekaran saja, sementara struktur ekonomi sebelum pemekaran tidak diteliti sehingga tidak diperoleh perbandingan struktur ekonomi sebelum dan setelah pemekaran.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain (1) Hasil perhitungan analisis *Location Quotient* (LQ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai kabupaten induk terdapat 10 sektor unggulan yang dapat diprioritaskan pada periode tahun 2014-2018. Sedangkan di Kabupaten Balangan sebagai kabupaten hasil pemekaran hanya satu sektor yang termasuk sektor basis unggulan. (2) Hasil analisis *Shift-Share* diketahui sektor-sektor ekonomi di kabupaten induk dan kabupaten hasil pemekaran yang pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komponen *Proportional Shift* (M) positif ( $M > 0$ ) masing-masing sebanyak 15 sektor. Selain itu komponen *differential shift* (C) yang bernilai positif ( $C > 0$ ) untuk melihat sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif atau dapat bersaing di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten induk sebanyak 8 sektor dan di kabupaten hasil pemekaran tidak ada satupun. Adapun analisis pergeseran bersih melalui *Shift-Share* yang diketahui pada kabupaten induk terdapat 14 sektor yang termasuk kedalam sektor progresif dan di kabupaten hasil pemekaran hanya satu sektor. Dilanjutkan analisis *overlay* dengan hasil di kabupaten induk terdapat 10 sektor unggulan, 4 sektor berkembang, 2 sektor potensial dan satu sektor terbelakang. Sedangkan pada kabupaten hasil pemekaran tidak ada satupun sektor unggulan, 15 sektor berkembang, 1 sektor potensial dan dua sektor terbelakang.

### **Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian ini, adapun saran yang ingin disampaikan yaitu : Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum mengeluarkan keputusan untuk menyetujui adanya pemekaran daerah terlebih dahulu membuat pertimbangan, sehingga setelah adanya pemekaran terjadi memberikan keuntungan kedua wilayah baik wilayah Kabupaten Induk maupun wilayah Kabupaten Baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, M. A. (1992). *Ekonomi Indonesia Prospek Jangka Pendek dan Sumber Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Jakarta Pusat.
- Bungin, B. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Glasson, J. (1999). *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang: LPFEUI.
- Kaloh, D. J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan : Proses Masalah, Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Suryana. (2000). *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, T. (2003). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.